

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat strategis dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas guna mampu bersaing dengan kehidupan global. Sebuah keniscayaan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, mengingat begitu pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pentingnya pendidikan tidak bisa lepas dari guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran di lapangan. Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan suatu bangsa, karena pada hakikatnya guru merupakan eksekutor dalam mendidik peserta didik. Artinya guru memiliki amanah dan tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Dalam menjalankan amanahnya, guru haruslah menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya, baik dalam pengetahuan, sikap dan prilakunya

Menyikapi tantangan yang sangat besar ini, pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai hal-hal yang harus dimiliki seorang guru. Dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi dalam mengajar untuk menunjang pribadi guru agar menjadi guru yang profesional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi social. Menurut (Sajidan, 2010, hlm.3), kompetensi profesional dapat diperoleh melalui, kualifikasi akademik, pendidikan dan latihan, *short courses*, TOT, kursus, *research based learning*, dan *tutorial and exercise*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dimaknai bahwa untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah. Dalam hal ini perlu adanya proses pembelajaran dan berbagi pengalaman guna mengembangkan kualitas guru yang profesional.

Dalam mewujudkan kompetensi professional seorang guru dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah pembentukan komunitas edukatif dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dalam konteks kehendak komunitas yang lebih luas, dan MGMP salah satu dari komunitas edukatif yang berperan sebagai salah satu wahana dalam mengembangkan sikap professional seorang guru (Sajidan, 2010 dan Case, 2016).

Oleh karena itu, diantara langkah konkrit yang dilakukan adalah pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan salah satu representative dari Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, suatu wadah non struktural yang disediakan bagi para guru mata pelajaran sejenis untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja guru, dengan demikian peningkatan MGMP merupakan masalah yang sangat mendesak untuk menjadi perhatian dalam rangka menciptakan guru yang professional dan memiliki kinerja yang berkualitas.

Dengan melalui organisasi MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam dunia kerja. Peran serta MGMP dalam proses peningkatan kinerja, maka dituntut untuk senantiasa melakukan berbagai terobosan-terobosan yang pada nantinya akan membangun pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga dengan penyelenggaraan MGMP memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kinerja guru.

Agar kegiatan MGMP bermanfaat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hendaknya para anggota dilibatkan pada setiap tahapan kegiatan organisasi seperti tahap perencanaan program, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Firman : 2016) menunjukkan bahwa para guru pada dasarnya hanya dilibatkan dan terlibat secara optimal pada tahap pelaksanaan aktivitas MGMP saja. Guru tidak banyak dilibatkan pada tahap perencanaan seperti dalam penyusunan program maupun penetapan jadwal. Terlihat bahwa peranan pengurus lebih dominan dan penyusunan program ini juga tidak dilakukan melalui analisis kebutuhan guru. Begitu juga halnya pada tahap evaluasi, di mana guru hanya sebagai objek evaluasi, yaitu orang yang dievaluasi.

Hasil penelitian lain menjelaskan bahwa Untuk mencapai standard mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan secara terus-menerus (Winingsih : 2013). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, baik oleh Pemerintah secara langsung maupun melalui instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu didapat informasi bahwa, dalam organisasi MGMP masih banyak permasalahan yang memungkinkan menghambat dalam mengembangkan kompetensi guru. Hal ini menjadi sebuah masalah dimana jika melihat konsep MGMP yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi guru, namun disisi lain masih banyak kendala yang harus dihadapi. Hal ini menarik untuk diteliti dan dikritisi sehingga diharapkan ada solusi dalam menyikapi problemati di MGMP.

MGMP dan Guru merupakan satu kesatuan yang selaras dimana guru merupakan ujung tombak pendidikan dan MGMP sebagai wahana untuk mengembangkan profesionalisme guru. Namun hal ini masih bersifat abstrak, dimana perlu formulasi jitu guna mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Berkaitan dengan itu, mata pelajaran PPKn lah yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa, seperti halnya apa yang tetruang dalam tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan seperti halnya yang dijelaskan (Kalidjernih, 2010, hlm.167):

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan bentuk apapun adalah mempersiapkan 'seorang warga negara yang baik'. Secara tradisional, warganegara yang baik adalah individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakat.

Berdasarkan gagasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dimaknai bahwa MGMP memiliki peranan strategis dalam mengembangkan potensi guru, dan mata pelajaran PPKn sebagai materi dasar para peserta didik guna menjadi warganera yang baik, namun demikian banyaknya kendala yang terajdi dilapangan menjadikan MGMP PPKn sangat menarik untuk diteliti kaitannya dengan potensi guru dan urgensi pendidikan dalam upaya mengembangkn warganegara yang baik.

Berdasarkan pra penelitian, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 5 MGMP, yaitu sub rayon 01, sub rayon 02, sub rayon 03, sub rayon 04, dan sub rayon 05. Sub rayon 1 mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, dan Kecamatan Cisarua. Lebih lanjut dalam MGMP sub rayon 1 terdapat dua orang yang berpredikat IK (instruktur kabupaten) PPKn, IK bergerak dalam memberikan bimbingan terhadap guru-guru lain untuk berbagi keilmuannya guna pemerataan potensi guru.

Lebih lanjut setelah mengadakan pra-penelitian lanjutan didapat informasi bahwasannya pada MGMP Kabupaten Bandung Barat mengayomi setiap MGMP yang ada pada setiap sub rayon. Salah satu program kerja besar yang berdampak sistemik dari MGMP Kabupaten yaitu pembuatan soal USBN PPKn. Pembuatan soal USBN sebagian besar diserahkan kepada MGMP Kabupaten sebagai wujud dari desentralisasi pendidikan, yang artinya MGMP Kabupaten berhak merumuskan sistem yang sesuai dengan karakter, budaya dan keunikan dari setiap daerah tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap SDM dan SDA yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pembuatan soal USBN, tim perumus didominasi dari guru sub rayon 01, hal ini didasarkan pada aspek pengalaman dan kapabilitas individu-individu guru yang terhimpun di sub rayon 01 dirasa sudah mumpuni untuk mengembangkan soal untuk tingkat kabupaten. Disamping itu, dilihat dari jenis kegiatan, agenda kegiatan yang ada pada subrayon 1 dirasa lebih masif, seperti halnya mengadakan BIMTEK yang bekerjasama dengan UPI dalam pengembangan potensi guru dalam mengembangkan standar isi dan standar proses.

Lebih lanjut berdasarkan pra penelitian, MGMP PPKn sub rayon 01 juga mendukung pengembangan guru secara individu, subrayon 01 mendukung dan membina anggotanya guna lebih berprestasi, seperti halnya pembinaan penulisan karya tulis ilmiah pada media masa, mendorong guru untuk menjadi guru berprestasi.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Bandung Barat sebagai organisasi guru mata pelajaran memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja guru pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu penting dan sangat menarik untuk dikaji

dan diteliti berkaitan dengan peran MGMP PKN sub rayon 01 Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mengembangkan sikap profesionalisme guru.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Selanjutnya, untuk membatasi fokus pelaksanaan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka selanjutnya dibuatkan rumusan masalah penelitian. Secara umum penelitian ini berusaha menggali tentang Problematik MGMP PPKn dalam Mengembangkan kompetensi profesional guru . Sementara itu, secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematik MGMP PPKn dalam menyikapi kebijakan pendidikan yang terus berkembang?
2. Bagaimana problematik yang dihadapi MGMP PPKn dalam menjalankan organisasinya?
3. Mengapa MGMP PPKn kurang maksimal dalam mengembangkan kompetensi profesional guru?
4. Bagaimana upaya MGMP PPKn dalam menyikapi kendala mengembangkan kompetensi profesional guru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Problematik MGMP PPKn dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Hal ini mengingat MGMP merupakan salah satu wahana bagi guru dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, sebagai bekal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas.

Adapun secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang problematik MGMP PPKn dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
2. Untuk mengidentifikasi problematik yang dihadapi MGMP PPKn dalam menjalankan organisasinya.
3. Mengetahui latar belakang kurang maksimalnya MGMP PPKn dalam mengembangkan kompetensi profesional guru.
4. Mengidentifikasi upaya-upaya MGMP PPKn dalam menyikapi kendala mengembangkan kompetensi profesional guru.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan PPKn, khususnya dalam menumbuh kembangkan sikap profesionalisme guru mata pelajaran PPKn.

### **2. Secara Praktis**

Selain secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi guru PPKn, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan potensi sumber daya guru khususnya dilingkungan sub rayon 01 kabupaten Bandung barat dan umumnya bagi semua guru di Indonesia. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini dapat dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di sekolah. Melalui pemahaman mendalam dengan program MGMP diharapkan mampu membantu mewujudkan guru professional.
- b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan pengetahuan mengenai upaya mempersiapkan diri untuk menjadi guru professional, melalui penelaahan secara mendalam dalam kegiatan MGMP.

### **3. Secara Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa pengembangan kompetensi professional guru niscaya diperoleh guru guna mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa.

### **4. Secara Isu**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kegiatan atau aksi terhadap MGMP PPKn guna lebih memaksimalkan perannya dalam mengembangkan kompetensi guru.

## **E. Struktur Organisasi Penulisan**

Penulisan Tesis ini disusun ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I	Isi dari bab ini meliputi; latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
Bab II	Isi dari bab ini meliputi;
Bab III	Isi dari bab ini meliputi; pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan pengujian keabsahaan data.
Bab IV	Isi dari bab ini meliputi temuan dan pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan.
Bab V	Isi dari bab ini meliputi simpulan, implikasi, dan rekomendasi merupakan jawaban dari aspek yang diteliti.